

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dataran Tinggi Golan menjadi perebutan antara Suriah dan Israel semenjak Perang Enam Hari yang terjadi antara kedua negara pada Juni 1967 hingga saat ini.¹ Hal ini disebabkan oleh pentingnya wilayah tersebut dilihat dari segi ekonomi dan keamanan. Dari segi ekonomi, wilayah yang berada di bagian paling barat ini merupakan daerah yang makmur secara agrikultur. Di mana komoditas utama dari wilayah ini adalah apel, tomat, biji-bijian dan hasil panen makanan ternak. Di wilayah ini juga terdapat hulu Sungai Jordan yang menjadi sumber air yang sangat penting bagi negara-negara yang berada di sekitarnya.² Seperti Israel yang memanfaatkan irigasi dari Sungai Jordan untuk membuat pemukiman baru dan memanfaatkan wilayah Dataran Tinggi Golan sebagai kebun buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, tanaman zaitun, dan Anggur. Israel juga menjadikan wilayah ini sebagai peternakan domba, kambing, dan lembu.³ Sedangkan dari segi militer, daerah ini menjadi *buffer zone* bagi Israel untuk mencegah kemungkinan invasi Suriah dan ancaman negara-negara Arab lainnya.⁴

Secara sah Dataran Tinggi Golan merupakan milik dari Suriah, namun sejak invasi tahun 1967, dua pertiga dari wilayah ini berada di bawah kontrol Israel. Sebagai pemilik sah dari Dataran Tinggi Golan, Suriah tentu telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan kembali Dataran Tinggi Golan.

¹ Dina Rezk “Six-Day War.” *In The Arab World and Western Intelligence: Analysing the Middle East*, 2017: 175–99.

² *National Foreign Assessment Center*. “Syria-Israel: The Golan Heights In Perspective”. 2009, 6.

³ Narottam Gaan. “Water And Conflict In West Bank And Golan Heights: Are Environmental Issues And National Security Linked?” *India Quarterly* 58. 2002: 129-144.

⁴ Maya Lubell. *Reuters*. 22 Maret 2019. <https://www.reuters.com/article/us-usa-israel-golanheights-explainer-idUSKCN1R22IR> (diakses pada 2020).

Upaya tersebut terbagi dua, yakni upaya dengan menggunakan angkatan bersenjata berupa perang, dan upaya damai berupa negosiasi dan diplomasi .⁵

Usaha pertama Suriah untuk merebut kembali wilayah Dataran Tinggi Golan adalah Perang Yom Kippur. Perang ini terjadi pada 6 Oktober 1973 di Dataran Tinggi Golan. Perang yang bertepatan dengan hari raya orang Yahudi ini membuat Israel lengah sehingga Suriah berhasil menembus pertahanan terluar Israel. Tiga hari kemudian karena kekurangan peralatan militer, Suriah mulai melemah dan memutuskan untuk menarik diri meskipun sempat merusak sejumlah pangkalan udara dan pemukiman penduduk Israel .⁶ Upaya selanjutnya berada dalam konteks negosiasi, yang telah dimulai semenjak tahun 1991. Upaya Suriah untuk mendapatkan kembali Dataran Tinggi Golan melalui jalur damai ini sebenarnya mendapat sambutan baik dari Israel. Hal ini terbukti dari persyaratan yang diajukan oleh pihak Israel. Di mana Israel bersedia untuk menarik diri dari wilayah yang didudukinya pada tahun 1967 apabila Suriah bersedia menormalisasi hubungan dengan Israel . Sementara Suriah mengatakan apabila Israel telah melakukan penarikan diri dari Dataran Tinggi Golan, barulah Suriah akan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.⁷

Hal ini menjadi salah satu alasan pasang surut upaya damai di antara Suriah dan Israel, di samping permasalahan domestik yang dihadapi oleh para pemimpin Israel yang bersedia untuk berdamai dengan Suriah. Ringkasnya, upaya damai yang dilakukan oleh Suriah dan Israel di antaranya adalah pembicaraan

⁵ Dion Wahyudi Wanto, Idjang Tjarsono. "Motivasi Suriah Merebut Kembali Dataran Tinggi Golan Dari Israel". 2009: 8.

⁶ Michael I Handel. "The Yom Kippur War and the Inevitability of Surprise." *International Studies Quarterly* 21. 1977: 461–502.

⁷ Paul Salem. "The Imperatives of Syrian-Israeli Peace." *The Fletcher Forum of World Affairs* 33, 2009: 63–72.

setingkat duta besar yang dilakukan di Washington pada tahun 1994-1995.⁸ Pembicaraan ini dilakukan pada masa Perdana Menteri Yitzhak Rabin berkuasa.⁹ Akan tetapi kesepakatan ini terhenti setelah Perdana Menteri Yitzhak Rabin dibunuh pada bulan November 1995, empat bulan setelah pembicaraan damai . Upaya selanjutnya yakni pada tahun September 2004 dan Juli 2006 dilakukan sejumlah pertemuan rahasia yang isinya kurang lebih sama dengan perundingan damai sebelumnya. Dengan tambahan bahwa Israel akan tetap memiliki kontrol terhadap sumber air dan akan dibentuk taman perdamaian dan zona demiliterisasi di perbatasan kedua negara. Pembicaraan ini dilakukan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ariel Sharon dan Perdana Menteri Ehud Olmert. Namun, tidak jadi terwujud karena Perdana Menteri Ariel Sharon tiba-tiba mengalami stroke dan kemudian digantikan oleh Perdana Menteri Ehud Olmert. Upaya ini berlanjut hingga tahun 2007. Melalui upaya negosiasi kedua negara dengan dimediasi oleh Turki dalam konferensi Annapolis. Meskipun begitu rencana ini tidak terlaksana karena kekuasaan Perdana Menteri Ehud Olmert sudah habis dan digantikan oleh Benjamin Netanyahu.¹⁰ Benjamin Netanyahu merupakan Perdana Menteri yang dinilai cukup unik dan paling efisien, karena kebijakan Luar Negeri pada masanya dianggap sangat cocok dengan prinsip diplomasi berbasis keamanan yang menjadi prinsip dasar kebijakan Luar Negeri Israel sejak berdirinya negara ini.¹¹

⁸ *Jewish Virtual Library*. <https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-syria-negotiations> (diakses pada 2020).

⁹ Itamar Rabinovich. "Israel and Syria, Rabin and Asad." *In The Brink of Peace: The Israeli-Syrian Negotiations*, , 1998: 14-53.

¹⁰ Ronen Hoffman. "Israel Foreign Policy under Benjamin Netanyahu." *The Philadelphia Papers*, 2019: 8.

¹¹ Barry Ellsworth. *World, Middle East*, 13 Desember 2021. <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/netanyahu-never-wanted-peace-with-palestinians-trump/2446470> (diakses pada 7 Juni 2022).

Negosiasi damai yang pernah terjadi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Negosiasi Damai Israel-Suriah

Tempat dan Waktu Pelaksanaan	Pelaksanaan	Pembahasan
Konferensi Madrid 1991 (Kemudian dilanjutkan di Washington)	Delegasi Israel dan Delegasi Suriah (Terlaksana di masa pemerintahan Perdana Menteri Yitzhak Shamir dan Perdana Menteri Shimon Peres)	Tahun 1994, perundingan di tingkat duta besar di Washington, membahas mengenai pengaturan keamanan Desember 1994 dan Juni 1995, Pertemuan Kepala Staff Israel dan Suriah Dalam negosiasi ini Israel menyatakan kesediaannya untuk menarik diri secara damai dari Dataran Tinggi Golan. Hal yang dibahas: Sejauh mana penarikan akan dilakukan dan waktu pelaksanaannya.
Aspen, Amerika Serikat, Desember 1995-Januari 1996.	Pelaksana setingkat Duta Besar	Perundingan tanpa prasyarat untuk membahas perdamaian, normalisasi, dan permasalahan air.
Washington, 15 Desember 1999 Sheoherdstown, Januari 2000	Perdana Menteri Barak dan Menteri Luar Negeri Suriah Farouk a-Shara	Membahas perundingan damai.
April 2007	Israel dipimpin oleh Perdana Menteri Ehud Olmert	Perdana Menteri Ehud Olmert menyatakan adanya keinginan untuk berdamai dengan Suriah selagi negara tersebut menghentikan dukungannya kepada organisasi-organisasi yang mengancam keamanan Israel.
21 Mei 2008	Turki	Adanya inisiasi yang diumumkan di Ankara, Damaskus, dan Jerusalem bahwa akan diadakannya pembicaraan damai secara tidak langsung antara Israel dan Suriah yang disponsori oleh Turki

Sumber : Windratmo Suwarno, Irwan Abdullah.¹²

Di masa pemerintahannya yang kedua kali Benjamin Netanyahu mengeluarkan keputusan untuk tidak lagi menegosiasikan Dataran Tinggi Golan dengan Suriah. Hal ini terdapat dalam pernyataannya yang menyatakan “I chose

¹² Windratmo Suwarno, “Irwan Abdullah. Strategi Suriah Dalam Menghadapi Konflik Dengan Israel 1991-2013”. 2013.

to hold this festival cabinet meeting on the Golan Heights to deliver clear message the Golan Heights will forever remain a Israel hands. Israel will never withdraw from The Golan Heights”.¹³

Meskipun sebelumnya pada tahun 2010 Benjamin Netanyahu sepakat dengan Presiden Bashar Al-Assad untuk menarik diri dari Dataran Tinggi Golan dengan imbalan bahwa Suriah akan memutus hubungannya dengan Iran dan Hizbullah. Akan tetapi kemudian Benjamin Netanyahu tidak pernah meralisasikan kesepakatannya setelah meletusnya konflik Suriah dan pada tahun 2011.¹⁴ Diperburuk dengan terlibatnya Israel dalam sejumlah serangan yang terjadi pada tahun 2012 hingga tahun 2019. Serangan tersebut merupakan serangan udara terhadap fasilitas militer seperti pangkalan udara dan laboratorium penelitian yang berada¹⁵ di Damaskus dan daerah di sekitar Dataran Tinggi Golan¹⁶ Berdasarkan latar belakang di atas, terlihat bahwa adanya perubahan kebijakan luar negeri Israel terhadap Suriah pada masa pemerintahan kedua Benjamin Netanyahu. Israel mulai merubah kebijakan luar negerinya terkait Dataran Tinggi Golan, yakni dengan menghentikan upaya negosiasi yang selama ini telah dilaksanakan oleh Perdana Menteri terdahulu. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perubahan tersebut dengan berfokus kepada Benjamin Netanyahu sebagai inti dari perubahan kebijakan Luar Negeri Israel terhadap Dataran Tinggi Golan.

¹³ Raphael Ahren. *The Times of Israel*. 17 April 2016. <https://www.timesofisrael.com/netanyahu-vows-golan-heights-will-remain-part-of-israel-forever/> (diakses pada 2020).

¹⁴ Amir Tibon. *Haaretz*. 5 September 2018. <https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/2018-09-05/ty-article/.premium/kerry-reveals-details-of-secret-2010-assad-netanyahu-letter/0000017f-e0e3-d804-ad7f-f1fb6e510000> (diakses pada 2021).

¹⁵ *Reuters*. 11 Januari 2019. <https://www.voanews.com/a/syria-israeli-missiles-strike-damascus-airport/4739966.html> (diakses pada 2020).

¹⁶ Ronen Hoffman. “Israel Foreign Policy under Benjamin Netanyahu.” *The Philadelphia Papers*, 2019: 2.

1.2. Rumusan Masalah

Israel dan Suriah adalah dua negara yang tidak pernah memiliki hubungan baik. Awalnya hal ini disebabkan oleh dukungan yang diberikan Suriah kepada Palestina. Di kemudian hari berubah menjadi hubungan buruk yang disebabkan oleh pendudukan Israel terhadap Dataran Tinggi Golan yang dahulunya merupakan bagian dari wilayah provinsi Quneitra, Suriah. Di balik hubungan yang tidak baik tersebut masih terdapat upaya untuk berdamai dari kedua pemerintah meskipun belum mencapai kesepakatan untuk mengembalikan Dataran Tinggi Golan. Hal ini terlihat dari sejumlah upaya diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh kedua pihak seperti Konverensi Madrid dan Negosiasi Clinton.

Akan tetapi menjabatnya Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya membuat upaya perdamaian tersebut menjadi semakin pudar karena perubahan kebijakan luar negeri Israel sendiri terutama terhadap Dataran Tinggi Golan. Perubahan ini dibuktikan dengan pernyataan Benjamin Netanyahu yang menyatakan bahwa Israel tidak akan lagi menegosiasikan Dataran Tinggi Golan yang memiliki peran penting bagi Israel baik dari segi ekonomi terutama permasalahan air dan dari segi keamanan. Israel juga terlibat dalam sejumlah serangan yang dilakukan oleh Israel pada tahun 2012 sampai pada tahun 2019 di dekat Dataran Tinggi Golan yang bersamaan dengan berlangsungnya konflik di Suriah. Dan daerah yang diserang bukanlah daerah konflik seperti Aleppo atau Deraa melainkan Dataran Tinggi Golan yang jelas sudah dikuasai oleh Israel dengan dalih mencegah Hizbullah.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Karakter Pribadi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam Kebijakan Luar Negeri Israel terhadap Dataran Tinggi Golan?”

1.4. Tujuan Penelitian

Sementara itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis terhadap bagaimana Karakteristik Pribadi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam Kebijakan Luar Negeri Israel terkait Dataran Tinggi Golan.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini bagi para pembaca atau peneliti lain adalah penelitian ini bisa menjadi sumber referensi, sumber informasi, dan pembandingan tentang bagaimana proses pembuatan sebuah kebijakan luar negeri di Israel terutama dilihat dari focus individu, dan hal-hal atau informasi lain yang berkaitan dengan isi penelitian ini.

1.6. Studi Pustaka

Dalam mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti, maka, penulis melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut diperoleh dari artikel-artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber elektronik lain.

Studi kepustakaan pertama bersumber dari sebuah artikel jurnal yang berjudul “Peran Strategis Suriah dalam Konflik Arab-Israel terhadap Legitimasi Presiden Bashar Al-Assad” karya Windratmo Suwarmo. Dalam artikelnya, fokus

pembahasan Windratmo Suwarno adalah legitimasi politik di Suriah. Menurutnya, legitimasi politik sangat berpengaruh pada stabilitas politik di Suriah karena Suriah merupakan salah satu negara yang berbatasan dengan wilayah konflik Arab-Israel. Legitimasi politik di Suriah dipegang oleh Presiden Bashar Al-Assad dan bermasalah ketika meletusnya Konflik Suriah pada Maret 2011. Konflik ini menjadi konstelasi politik antara pihak yang menginginkan mundurnya Presiden Bashar Al-Assad dan pihak yang mendukung agar Presiden Bashar Al-Assad tetap berkuasa. Pihak yang menginginkan Presiden Bashar Al-Assad untuk mundur dari jabatannya adalah pihak-pihak yang mendukung oposisi. Mereka adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, Qatar, Jordan, dan negara sekutu Amerika Serikat lainnya . Keterlibatan Amerika Serikat dan sekutunya berkaitan erat dengan kekhawatiran Israel akan hubungan Suriah dengan Hizbullah yang menjadi ancaman keamanan nasional yang serius bagi Israel. Penelitian yang dilakukan oleh Windratmo Suwarno merupakan penelitian yang menganalisis kebijakan luar negeri dari sudut pandang individu. Sama halnya dengan penelitian yang penulis lakukan hanya saja individu yang dianalisis berbeda, di mana pada studi kepustakaan yang pertama individu yang dianalisis adalah Bashar Al-Assad sementara penulis menganalisis individu Benjamin Netanyahu.¹⁷

Studi kepustakaan kedua bersumber dari artikel jurnal yang berjudul “Motivasi Suriah merebut kembali Dataran Tinggi Golan dari Israel Tahun 2009”. Artikel ini merupakan penelitian dari Dion Wahyudi Wanto dan Idjang Tjarsono. Dalam artikel ini kedua penulis berpendapat bahwa konflik yang terjadi antara Israel dan Suriah disebabkan oleh pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

¹⁷ Windratmo Suwarno, “Irwan Abdullah. Strategi Suriah Dalam Menghadapi Konflik Dengan Israel 1991-2013”. 2013: 55-63.

Pendudukan wilayah yang dahulunya merupakan bagian dari provinsi Quneitra, Suriah ini merupakan akibat dari kekalahan Suriah dalam Perang Enam Hari selama tahun 1967.

Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah yang memiliki nilai strategis bagi Israel maupun Suriah. Pertama, Dataran Tinggi Golan terletak pada perbatasan tiga negara, yaitu, Israel, Suriah, dan Lebanon. Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah dengan luas 1.800 km². Dengan wilayah yang berada di bawah pendudukan Israel seluas 1.150 km², dan selebihnya berada di bawah kekuasaan Suriah. Dataran Tinggi Golan sendiri merupakan wilayah berbukit-bukit yang lembahnya menghadap langsung ke Israel. Sementara puncaknya, menghadap langsung ke Lebanon. Artinya, Dataran Tinggi Golan sangat penting untuk kepentingan militer baik bagi Israel, maupun Suriah. Kedua, potensi ekonomi yang dimiliki oleh Dataran Tinggi Golan. Dataran Tinggi Golan memiliki tanah yang sangat subur dan kaya akan sumber air yang membuatnya sangat penting terutama dalam bidang pertanian. Selain itu Dataran Tinggi Golan juga memiliki potensi pariwisata yang sangat menguntungkan.¹⁸

Hal inilah yang menjadi alasan di balik motivasi Suriah merebut Dataran Tinggi Golan dari Israel. Upaya pertama yang dilakukan oleh Suriah untuk merebut kembali Dataran Tinggi Golan menggunakan jalur perang, yakni Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Upaya selanjutnya menggunakan jalur diplomasi oleh Suriah terhadap Israel dan jalur negosiasi. Di antaranya, Konferensi Madrid yang dilaksanakan pada 31 Oktober 1991. Selanjutnya negosiasi bilateral tingkat

¹⁸ Idjang Tjarsono. "Motivasi Suriah Merebut Kembali Dataran Tinggi Golan dari Israel Tahun 2009.

Duta Besar antara Israel dan Suriah yang dilaksanakan di Washington pada bulan Desember 1994 dan Juni 1995. Dilanjutkan dengan negosiasi Perdamaian Clinton 1999-2000 dan negosiasi yang dimediasi oleh Turki pada akhir tahun 2007 dalam konferensi Annapolis.

Upaya ini mengalami pasang surut karena dipengaruhi oleh fluktuasi pembicaraan damai sengketa yang terjadi antara Palestina dan Israel, serta jalan buntu yang ditemui oleh kedua pihak terkait kepentingan masing-masing, serta keengganan kedua pemimpin negara tersebut untuk benar-benar berdamai. Puncaknya, ketika Benjamin Netanyahu menjabat, Israel menyatakan tidak akan lagi merundingkan masalah Dataran Tinggi Golan. Pada penelitian ini unit analisa yang diteliti adalah Suriah, yang merupakan state actor. Sementara penulis meneliti unit analisa individu Benjamin Netanyahu.

Selanjutnya, studi kepustakaan yang ketiga, bersumber dari sebuah artikel jurnal dengan judul “Pertahanan Israel: Awal Buramnya Masa Depan Perdamaian di Timur Tengah”. Artikel ini merupakan penelitian dari Abdul Rahman. Dalam penelitiannya, Abdul Rahman mengatakan meskipun Israel baru berdiri pada tahun 1948, kekuatan pertahanan Israel sudah dibentuk sebelum berdirinya negara tersebut. Di mana kekuatan pertahanan ini menjadi komponen utama terbentuknya Israel Defense Force (IDF). Tujuan dari pembentukan IDF ini sendiri adalah untuk melakukan tekanan politik dan memperoleh tanah atau yang lebih dikenal dengan istilah politik manuver. Semenjak tahun 1879, kaum Yahudi sudah mulai mendirikan organisasi sukarelawan yang memiliki visi dan misi untuk mendapatkan tanah di Palestina. Organisasi-organisasi ini juga berusaha menyatukan keturunan-keturunan Yahudi.

Kemudian didirikanlah unit pertahanan zionis yang bertugas untuk memata-matai dan membeli tanah dari penduduk Palestina. Setiap tahunnya, kaum Yahudi memasuki Palestina, baik melalui jalur resmi, maupun jalur ilegal. Upaya mendatangkan kaum Yahudi ini disebut dengan Aliyah. Aliyah ini berlangsung dalam lima tahapan, di mana tahapan pertama mendatangkan 25,000 orang kaum Yahudi pada tahun 1880-an. Selanjutnya Aliyah kedua pada tahun 1904-1913 mendatangkan sebanyak 40,000 orang. Aliyah ketiga (1919-1923) mendatangkan sebanyak 35,000 orang, Aliyah keempat (1924-1928) mendatangkan sebanyak 67,000 orang dan Aliyah kelima (1929-1938) mendatangkan sebanyak 250,000 orang.

Dalam penelitiannya, Abdul Rahman juga menyampaikan bahwa setiap negara di dunia mempunyai sistem pertahanan termasuk Israel. Di mana Israel membuat hubungan politik dan militer menjadi suatu kekuatan. Israel memiliki kecenderungan untuk memancing negara-negara Arab untuk berperang dengan Israel karena perang merupakan satu-satunya cara bagi Israel untuk dapat menduduki wilayah di sebuah negara dan mengalihkan statusnya. Israel akan menggunakan formasi militer, ideology dan strategi dalam keseluruhan sistem pertahanannya untuk memperoleh tanah.

Kebijakan pertahanan Israel mengedepankan pertahanan menyeluruh dengan mementingkan tindakan ofensif. Tanpa ada tindakan ofensif, Israel tidak akan bisa melakukan tekanan yang selama ini menjadi rahasia kemenangannya di balik perang melawan negara-negara Arab. Perdamaian bukanlah tujuan utama Israel melainkan memperoleh tanahlah yang menjadi tujuannya. Akan

sangat mustahil untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah selama Israel masih bersikap ofensif.¹⁹

Penelitian tersebut lebih berfokus kepada alasan pembuatan kebijakan luar negeri Israel selalu mengedepankan nilai-nilai pertahanan. Sedikit berbeda di mana penulis berusaha menjelaskan perubahan kebijakan luar negeri berdasarkan karakteristik individu Benjamin Netanyahu. Sumber kepustakaan ketiga ini akan menjadi rujukan dalam menjelaskan karakteristik individu dari Benjamin Netanyahu.

Studi kepustakaan keempat bersumber dari sebuah artikel berjudul “*Israel’s Foreign Policy Under Benjamin Netanyahu*” yang ditulis oleh Ronen Hoffman. Dalam artikel ini Benjamin Netanyahu adalah Perdana Menteri Israel saat ini dan sudah menjabat kurang lebih selama tiga belas tahun. Menurut Hoffman kebijakan luar negeri Israel di bawah Benjamin Netanyahu berfokus pada upaya untuk menyenangkan dan memastikan kelangsungan basis politiknya. Benjamin Netanyahu berasal dari partai garis keras sayap kanan yang bisa dipastikan akan membatasi kebijakan apapun yang berusaha mempromosikan rekonsiliasi dengan Palestina, dan akan selalu mendukung aneksasi wilayah . Benjamin Netanyahu juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan Israel semenjak mundurnya Avigdor pada November 2018 dan juga Menteri Luar Negeri.

Karakteristik Kebijakan Luar Negeri Israel selama ini didominasi oleh pertahanan dibandingkan dengan diplomasi karena lebih mudah mencapai konsensus mengenai masalah keamanan militer daripada masalah yang lebih

¹⁹ Abdul Rahman. “Pertahanan Israel: Awal Buramnya Masa Depan Perdamaian di Timur Tengah”. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. 2012: 16-25.

sensitif seperti konflik Israel-Palestina, status Yerussalem, kontrol atas wilayah yang diduki dan pemukiman Yahudi di Tepi Barat. Hal ini tercermin dari doktrin pertahanan yang membentuk wajib militer bagi pria dan wanita Yahudi. Di mana faktanya banyak pejabat politik, pimpinan perusahaan swasta, dan lembaga pendidikan didominasi oleh mantan perwira militer berpangkat tinggi. Singkatnya, Kebijakan Luar Negeri Israel merupakan pilar utama bagi Keamanan Nasional Israel. Keseluruhan pembentukan kebijakan di Israel mencerminkan konsep peringatan, pencegahan, dan kemenangan militer.

Kombinasi Kementerian Luar Negeri Israel yang lemah dan Kementerian Pertahanan yang dominan, membuat keputusan Kebijakan Luar Negeri Israel utamanya berada di tangan Perdana Menteri. Akan tetapi, dengan adanya sistem politik berbasis koalisi menjamin keseimbangan dan kompromi antara berbagai kelompok politik. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan isu sensitif cenderung membuat kemampuan Perdana Menteri dibatasi dalam merumuskan kebijakan. Berbeda dengan para pendahulunya seperti Yitzhak Rabin, Ariel Sharon, Ehud Olmert atau Ehud Barak yang bersedia mengambil resiko politik dan resiko pribadi. Contoh Ehud Barak adalah contoh Perdana Menteri Israel yang mengalami masalah ketika memutuskan untuk berdamai dengan Palestina dan Suriah. Sementara Perdana Menteri Netanyahu lebih memilih jalan aman yang membuatnya tetap berkuasa di Israel hingga saat ini.²⁰

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah Ronan Hoffman berusaha menjelaskan bagaimana proses pembuatan kebijakan luar negeri

²⁰ Ronen Hoffman. "Israel Foreign Policy under Benjamin Netanyahu." *The Philadelphia Papers*, 2019: 1-18.

dipengaruhi oleh parlemen-parlemen yang ada di Israel sehingga bisa dikatakan unit analisis dalam penelitian ini adalah state sementara unit analisis dalam penelitian penulis adalah individu.

Selanjutnya, studi kepustakaan yang kelima bersumber dari sebuah artikel jurnal berjudul “Israel’s Interests and Options in Syria” yang ditulis oleh Larry Hanauer. Dalam artikelnya, Hanauer berpendapat bahwa meskipun Israel memiliki letak yang sangat dekat dengan wilayah konflik, yaitu Suriah, Israel memiliki kepentingan yang sangat berbeda dengan negara-negara lain yang terlibat dalam Konflik Suriah. Menurutnya Israel justru lebih khawatir dengan pengaruh Iran dalam Konflik Suriah. Perang multi-faksi yang terjadi di Suriah mengancam stabilitas sekutu-sekutu negara penyokong utama Israel, Amerika Serikat. Hal ini menurut Hanauer sebenarnya bukanlah ancaman langsung bagi keamanan Israel.²¹

Menurut Hanauer dari pertemuan antara Israel dan Rusia, Israel mengatakan bahwa mereka tidak peduli dengan siapa yang nanti akan keluar menjadi pemenang dalam konflik Suriah. Mereka hanya peduli dengan gerak gerik Iran yang dikhawatirkan akan mengurangi kapabilitas militer Israel dalam bertindak. Akan tetapi Israel enggan untuk berkonflik langsung dengan Iran. Tujuan utama Israel dalam Konflik Suriah menurut Hanauer di antaranya adalah meminimalkan pengaruh Iran dan Rusia di Suriah, menghalangi transfer senjata canggih ke Hizbullah, mencegah Suriah dari menimbulkan ancaman militer ke Israel, atau mencegah Iran menimbulkan ancaman militer ke Israel, dan merusak legitimasi Suriah. Hanauer menekankan bahwa Israel dengan kemampuan yang

²¹ Larry Hanauer. “Israel Interests and Options in Syria”. 2016: 1-16.

sangat terbatas dalam mempengaruhi Konflik Suriah , ingin menekan kemampuan Teheran untuk beroperasi secara bebas di Suriah.

Menurut Hanauer, sejauh ini tindakan yang diambil oleh Israel dalam konflik Suriah semata-mata tindakan ofensif, hanya sesekali bersifat pre-emptive. Contoh keterlibatan Israel dalam Konflik Suriah di antaranya adalah keterlibatan Israel pada bulan Maret dan April tahun 2015. Di mana Israel menempatkan bom di Dataran Tinggi Golan yang bertujuan untuk membunuh militan. Sebelumnya Israel juga melakukan serangan menggunakan rudal pertahanan udara untuk menembak jatuh jet Angkatan Darat milik Suriah. Pada tahun 2012, Israel juga melancarkan serangan artileri ke wilayah perbatasan yang diklaim oleh Israel sebagai tindakan tegas mereka dalam menanggapi bentuk serangan kecil yang tidak disengaja sekalipun.

Israel juga telah mendukung pejuang Anti-Bashar Al-Assad dan warga sipil dengan memberikan bantuan kemanusiaan. Hanauer juga berpendapat bahwa Israel juga berupaya mencegah pembantaian terhadap warga sipil Druze yang dikhawatirkan akan mengungsi ke Israel. Hanauer juga mengatakan jika sekalipun Israel melakukan serangan yang agresif kepada Hizbullah dan Iran, Israel tidak akan memperoleh sedikitpun keuntungan dari hal tersebut. Dalam penelitian ini Hanauer lebih berfokus kepada alasan terlibatnya Israel dalam konflik suriah dilihat dari kepentingan. Sementara penulis lebih meneliti kepada keterlibatan Israel tersebut dengan berusaha menjelaskan karakter pribadi yang dimiliki oleh Benjamin Netanyahu selaku *decision maker*.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1 Kebijakan Luar Negeri

Dalam menganalisis sebuah kebijakan luar negeri peneliti dapat berfokus pada level analisis tertentu. Level analisis yang ada dalam Hubungan Internasional ada tiga, yakni sistem, negara, dan individu.²²

1.7.1.1. Sistem

Dinamika dalam sistem internasional akan senantiasa mempengaruhi aspek lain dalam hubungan internasional. Aspek-aspek yang terpengaruh bisa negara, ekonomi, masyarakat, bahkan individu. Dibutuhkan analisis mengenai *power* yang dimiliki oleh negara dalam sistem internasional. Apakah negara tersebut tergolong ke dalam negara yang memiliki *power* yang kuat atau lemah.

1.7.1.2. Negara

Kebijakan luar negeri yang diambil oleh sebuah negara dapat dianalisis dengan mengidentifikasi karakteristik yang dimiliki oleh negara tersebut. Karakteristik tersebut biasanya adalah sistem pemerintahan yang dianut oleh negara, apakah demokrasi atau sebaliknya, apakah negara tersebut merupakan negara yang lemah atau negara yang kuat. Atau bagaimana negara tersebut berinteraksi dengan negara lain dalam menghadapi sebuah krisis.

1.7.1.3. Individu

Individu dalam posisi tertentu, dalam hal ini individu yang bertanggung jawab terhadap sebuah kebijakan yang dikeluarkan. Individu tersebut memiliki perilaku,

²² M. Erdiansyah. "Faktor Idiosinkratik dalam Kebijakan Luar Negeri Presiden Donald Trump: Latar Belakang Pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani pada Tahun 2020." 2022.

kepribadian dan hal lain yang berkaitan dengan psikologi yang dapat mempengaruhi individu tersebut dalam membuat sebuah kebijakan luar negeri.

Untuk dapat memahami apa yang akan dianalisis maka perlu ditentukan level analisis mana yang akan diambil. Dalam penelitian ini penulis menggunakan level analisis individu untuk menjelaskan psikologi Benjamin Netanyahu dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Israel pada masa pemerintahannya. Dalam menganalisis psikologi seorang individu terdapat sebuah konsep yang membantu menjelaskan hubungan antara individu dengan kebijakan yang dibuatnya. Konsep tersebut adalah konsep Karakter Pribadi yang dikemukakan oleh Margaret G. Hermann.²³

1.7.2. Karakter Pribadi

Konsep ini merupakan konsep yang diutarakan oleh Margaret G. Hermann. Di dalam artikel yang berjudul “*Explaining Foreign Policy Behaviour Using The Personal Characteristics of Political Leaders*”, di dalam artikel ini Margaret menjadi satu-satunya peneliti studi internasional yang mengkaitkan konsep *personal characteristics* dengan kebijakan luar negeri. Oleh karena itu, penulis menjadikan penelitian tersebut sebagai referensi dalam menganalisis *personal characteristics* Benjamin Netanyahu dalam Kebijakan Dataran Tinggi Golan. Di dalam artikel tersebut, Margaret G. Hermann meneliti bagaimana karakter personal berhubungan dengan kebijakan luar negeri seorang pemimpin. Menurutnya karakteristik pribadi seorang pemimpin dapat membuat pemerintahannya bersifat agresif atau bersifat damai. Pemerintahan yang agresif

²³ Margaret G. Hermann. “Explaining Foreign Policy Behaviour Using the Personal Characteristics of Political Leaders.” *International Studies Quarterly*. 1980.

pemimpinnya cenderung membutuhkan kekuasaan, memanipulasi, dan mengontrol orang lain. Pemimpin dengan karakteristik ini juga kurang mempertimbangkan alternatif lain, selalu mencurigai motif, dan sangat ingin mempertahankan identitas dan kedaulatan nasional. Sebaliknya, pemerintahan yang lebih bersifat damai memiliki pemimpin yang cenderung membutuhkan kerja sama, mudah mempercayai orang lain dan percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol peristiwa yang ada. Karakteristik pribadi ini sendiri dibagi menjadi:

1.7.2.1. Beliefs

Keyakinan adalah asumsi dasar seorang pemimpin mengenai dunia yang dapat dilihat dengan menjawab pertanyaan apakah segala peristiwa yang ada di dunia bisa diprediksi?, apakah konflik dasar untuk terjadinya interaksi manusia?, bisakah seseorang mengontrol sebuah peristiwa?, dan apakah memelihara kedaulatan nasional dan superioritas adalah tujuan paling penting dari sebuah bangsa?. Keyakinan mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin politik menginterpretasikan lingkungannya, dan kemudian menjadikan interpretasi tersebut sebagai acuan dalam mengambil strategi yang akan dipakai. Keyakinan juga erat kaitannya dengan nasionalisme, kedua elemen ini apabila dimiliki seorang pemimpin maka ia akan mampu untuk mengontrol sebuah peristiwa. Di mana nasionalisme sering kali dijadikan alasan di balik sebuah tindakan spesifik seorang pemimpin. Kemampuan untuk mengontrol peristiwa ini nantinya akan menentukan aturan dasar sikap berpolitik.

1.7.2.2. Motives

Sebuah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin pada kenyataannya memiliki motif. Motif bisa berupa kebutuhan seorang pemimpin

akan kekuasaan, kebutuhan akan hubungan yang lebih dekat, atau kebutuhan akan persetujuan. Motif juga memberikan pengaruh terhadap bagaimana seorang pemimpin menginterpretasikan lingkungannya dan strategi apa yang akan diambilnya. Kebanyakan motif yang dimiliki oleh pemimpin saat ini bisa ditentukan melalui kebutuhannya akan kekuasaan dan hubungan yang lebih dekat. Kedua motif ini mempengaruhi sikap pemimpin terhadap negara lain.

1.7.2.3. *Decision Styles*

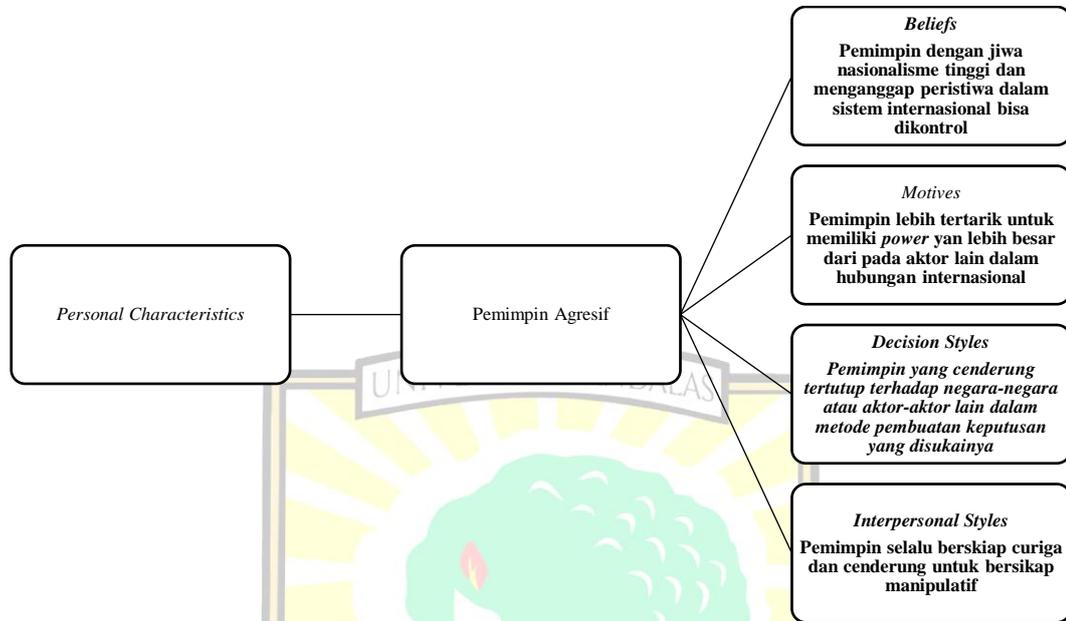
Gaya keputusan adalah sebuah metode yang lebih disukai oleh seorang pemimpin dalam membuat sebuah keputusan. *Decision styles* meliputi komponen-komponen seperti keterbukaan terhadap informasi baru, pilihan terhadap resiko tertentu, kompleksitas dalam menyusun dan memproses informasi, serta kemampuan untuk menghadapi ambiguitas. *Decision styles* juga sering disebut dengan instrumental *beliefs*. Dalam menentukan *decision styles* yang dimiliki oleh seorang pemimpin maka lebih mudah dilihat dari kompleksitas konseptual atau kompleksitas dalam menyusun dan memproses informasi. Pemimpin bagaimanapun juga akan cenderung menggunakan *decision styles* yang sama dalam kebijakan luar negerinya.

1.7.2.4. *Interpersonal Style*

Interpersonal styles adalah karakteristik yang dilihat dari bagaimana seorang pembuat kebijakan berhubungan dengan pembuat kebijakan lainnya. *Interpersonal styles* ini sendiri oleh Margaret G. Herman dibagi menjadi dua. Pertama, pemimpin yang dalam *interpersonal styles* nya selalu bersikap paranoid. Pemimpin seperti ini selalu memiliki kecurigaan yang berlebihan, tidak

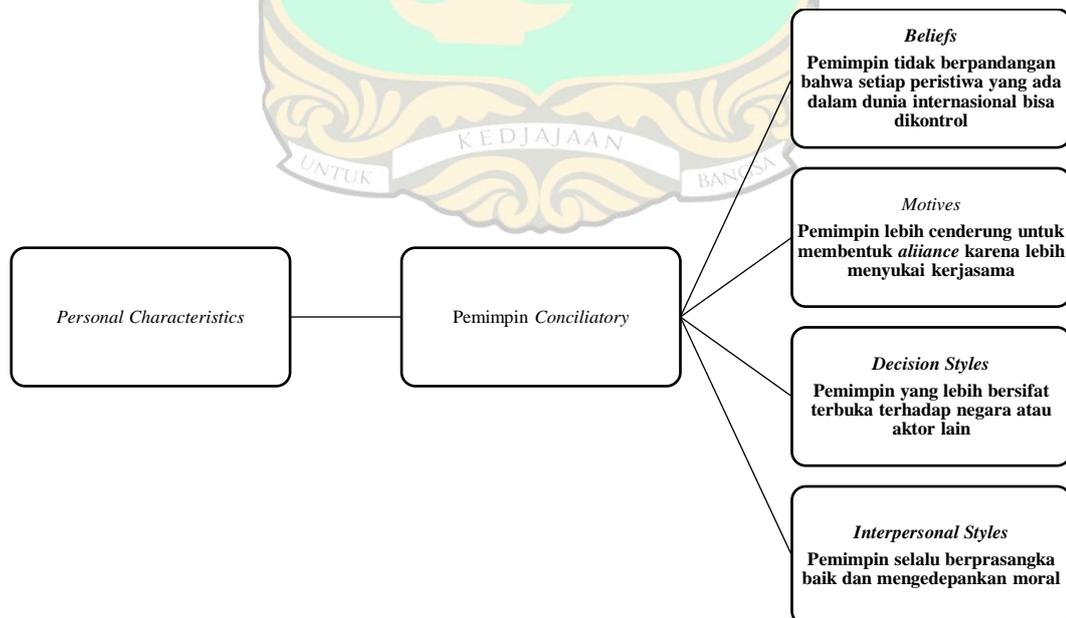
mengindahkan moral dan selalu bersikap manipulatif. Secara umum konsep ini akan diperlihatkan pada bagan di bawah ini:

Bagan 1.1. Karakteristik Pribadi Pemimpin Agresif



Sumber Bagan 1.1 Karakteristik Pribadi Pemimpin Agresif²⁴

Bagan 2.2. Karakteristik Pribadi Pemimpin Conciliatory



Sumber 1.2. Karakteristik Pribadi Pemimpin Conciliatory²⁵

²⁴ Margaret G. Hermann. "Explaining Foreign Policy Behaviour Using the Personal Characteristics of Political Leaders." *International Studies Quarterly*. 1980. 7-14.

Keempat karakteristik yang telah penulis sebutkan diatas mempengaruhi gaya dan isi dari sebuah kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. *Beliefs* dan *motives* menggambarkan bagaimana seorang pemimpin menginterpretasikan lingkungannya. Interpretasi tersebut kemudian digunakan untuk membuat pemerintahannya bertindak sesuai dengan *image* yang dibangun atas interpretasi tadi. Margaret G. Hermann menggambarkan bahwa *beliefs* dan *motives* mirip dengan peta konsep menjalankan pemerintahan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Begitupun dengan *decision style* dan *interpersonal styles*, metode yang lebih disukai di dalam membuat keputusan personal dan cara berinteraksi dengan aktor lain akan terbawa dalam perilaku politik seorang pemimpin.²⁶

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian eksplanatif sendiri adalah penelitian yang mencoba menjelaskan bagaimana suatu fenomena terjadi. Di mana penerapannya dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan konsep level analisis individu dan konsep "Karakter Pribadi" dari Margaret G. Hermann dalam mencoba menjelaskan hubungan antara Benjamin Netanyahu dan Kebijakan Israel terhadap Dataran Tinggi Golan. Menurut penulis kerangka konseptual tersebut akan membantu penulis dalam menganalisa serta memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini.

²⁵ Margaret G. Hermann. "Explaining Foreign Policy Behaviour Using the Personal Characteristics of Political Leaders." *International Studies Quarterly*. 1980. 7-14

²⁶ Margaret G. Hermann. "Explaining Foreign Policy Behaviour Using the Personal Characteristics of Political Leaders." *International Studies Quarterly*. 1980. 10 – 11.

1.8.2. Batasan Penelitian

Dalam sebuah penelitian diperlukan batasan agar suatu penelitian benar-benar berfokus kepada permasalahan tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini batas penelitian yang diambil terbatas dari tahun 2012 sampai pada tahun 2019. Di dalam rentang waktu tersebut terjadi perubahan kebijakan luar negeri Israel terhadap Dataran Tinggi Golan.

1.8.3. Unit dan Level Analisis

Unit analisis adalah unit yang akan diteliti perilakunya sementara unit eksplanasi adalah unit yang mempengaruhi perilaku dari unit analisis. Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah individu, yakni Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Pemilihan unit analisis ini dikarenakan peneliti akan mencoba menjelaskan apa yang mempengaruhi Benjamin Netanyahu selaku seorang *decision maker* untuk mengeluarkan kebijakan terhadap Dataran Tinggi Golan. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah Karakter Pribadi Benjamin Netanyahu. Sedangkan untuk level analisis dalam penelitian ini sendiri adalah level analisis state atau negara.

1.8.4. Teknik dan Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi atau studi Pustaka. Di mana penulis mencari dan membaca berbagai artikel yang berkaitan dengan topik penelitian lalu mengambil fakta-fakta yang relevan. Artikel-artikel tersebut bersumber dari situs penyedia jurnal ilmiah terpercaya, penelitian para mantan pejabat di Israel, situs pemerintah milik Israel, situs website berita seperti *The Jerusalem Post*, *Haaretz*, *BBC*, video dari beberapa *channel* yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan penelitian,

serta sebuah buku biografi karangan wartawan bernama Anshel Pfeiffer yang penulis beli melalui layanan *Google Books*.

1.8.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis penelitian kualitatif. Di mana penulis akan mengidentifikasi pola-pola umum dan hubungannya dengan data yang ada. Hal ini akan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini penulis akan menjelaskan mengenai karakter pribadi Benjamin Netanyahu, dimulai dari latar belakang kehidupan, pendidikan, karir, keyakinan, motif, dan gaya dalam membuat keputusan. Selanjutnya, penulis akan menggunakan penelitian terdahulu untuk menjelaskan dinamika hubungan Israel dan Suriah bersamaan dengan kebijakan-kebijakan pendahulu Benjamin Netanyahu.

Secara urut tahap pertama dalam penelitian ini adalah penulis akan menggunakan sumber-sumber otentik untuk menjelaskan hubungan yang ada antara Israel dan Suriah terkait kepemilikan Dataran Tinggi Golan. Selanjutnya, tahap kedua penulis akan menjelaskan upaya kedua negara untuk berdamai dan mengembalikan kepemilikan sah dari Dataran Tinggi Golan. Pada tahap ketiga penulis akan membahas mengenai karakter pribadi Benjamin Netanyahu. Baru kemudian pada tahap yang terakhir penulis akan menjelaskan bagaimana Karakter Pribadi Benjamin Netanyahu mempengaruhi setiap kebijakannya terhadap Dataran Tinggi Golan.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana karakteristik personal seorang Benjamin Netanyahu mempengaruhi kebijakan Israel untuk terlibat di dalam Konflik Suriah yang erat kaitannya dengan kebijakan terhadap Dataran Tinggi Golan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan mengenai analisis Kebijakan Luar Negeri Israel Terkait Konflik Suriah dan saran mengenai penelitian.

